

**TESIS**

**KETIDAKSETARAAN SANKSI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**



**YOHANES LEONARDUS NGOMPAT**

**215214335**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**





**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : Yohanes Leonardus Ngompat  
Nomor Mahasiswa : 215214335  
Kosentrasi : Litigasi  
Judul Proposal Tesis : **KETIDAKSETARAAN SANKSI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 4 April 2023.

**Dewan Penguji**

**Nama**

**Tanda Tangan**

1. Ketua

Dr. Al. Wisnubroto, SH., M. Hum.

2. Sekretaris

Dr. Ign. Sumarsono, SH., M. Hum.

3. Anggota

Dr. Anny Retnowati, SH., M. Hum.

**Ketua Program Studi**

**Dr. Animus Rhiti, SH., LL.M.**  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOHANES LEONARDUS NGOMPAT

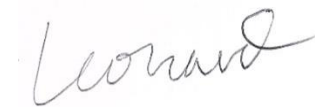
NIM : 215214335

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:  
**“KETIDAKSETARAAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Yang menyatakan:



YOHANES LEONARDUS NGOMPAT

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Ketidaksetaraan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan saran dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan limpah terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I untuk semua rangkaian proses bimbingan dan arahan serta tukar pikiran yang sudah Penulis dapatkan, baik selama penulisan Tesis ini maupun sebelum penulisan Tesis ini berlangsung.
4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II untuk semua rangkaian proses bimbingan dan arahan serta tukar pikiran yang sudah Penulis dapatkan, baik selama penulisan Tesis ini maupun sebelum penulisan Tesis ini berlangsung.

5. Bapak Mikael Feka, S.H., M.H. sebagai Dosen *Cyber Law* di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira selaku Narasumber dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. Antonius Maria Laot Kian selaku Dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebagai Narasumber dalam penelitian Tesis Penulis.
7. Bapa dan Mama Penulis, Bapa Michael dan Mama Bibiana yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dalam bentuk materil, moril maupun spiritual bagi Penulis.
8. Saudara dan saudari Penulis, yang juga turut memberikan dukungan dan doa kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada keluarga Besar penulis, Bapa Edward, Mama Mely maupun yang tidak disebutkan Penulis yang juga turut memberikan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Guru, Dosen dan Karyawan yang telah membantu dan memberikan kontribusi bagi pengembangan akademik Penulis.
11. Bang Hard, yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Penulis selama mengerjakan penelitian Tesis ini.
12. Gif, yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Penulis selama mengerjakan penelitian Tesis ini.
13. Keluarga besar Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya yang tidak sempat Penulis sebutkan untuk dukungannya sampai saat ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis, Bang Hard, Bang Panda, Bang Ricky, Bang Rio, Tania, Mba Ivana, Miya, Maureen, Berda untuk kebersamaan dan dukungannya.
15. Sahabat-sahabat Magister Hukum Atma Jaya yang tidak sempat penulis sebutkan untuk kebersamaan dan dukungannya.
16. Rekan magang di Kantor PBKH Atma Jaya, Bang Arie, Freya, Dewi, Mas Andre, Maureen atas kebersamaan dan dukungannya.
17. Keluarga K9: Uncle Koko, Om Wisnu, Ardy, Anggy, Bang Edo, Jonathan, Raymon, Brayen, Ricky, Rio, Acik, Ko Hery, Ios atas kebersamaan dan dukungannya.
18. Semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan yang telah memberi dukungan serta saran untuk Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan Tesis ini tidak menutup kemungkinan ditemukan kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu, Penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif untuk pengembangan dan menyempurnakan Tesis ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	14
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Pustaka.....	18
1. Definisi Data Pribadi dan Pelindungannya.....	18
2. Badan Publik dan Korporasi.....	24
3. Tinjauan tentang Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.....	31
B. Landasan Teori.....	36
1. Equality Before the Law.....	37



2. Teori Keadilan.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	43
C. Pendekatan.....	44
D. Cara Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	45
F. Proses Berpikir.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	48
B. Perbandingan Pengaturan Pelindungan Data Pribadi Dengan Negara- Negara Lain.....	56
1. Singapura.....	57
2. Malaysia.....	59
C. Ketidaksetaraan Sanksi Terhadap Badan Publik Dan Korporasi.....	62
D. Dampak Ketidaksetaraan Sanksi Terhadap Badan Publik Dan Korporasi Dari Perspektif <i>Equality Before the Law</i> , Keadilan dan Kepastian Hukum	73
1. Equality Before the Law.....	78
2. Perspektif Teori Keadilan.....	80
3. Perspektif Teori Kepastian Hukum.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui argumentasi hukum ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP dan dampak ketidaksetaraan sanksi bagi badan publik dan korporasi dalam UU PDP terhadap ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil yaitu ketidaksetaraan sanksi antara badan publik dengan korporasi dalam UU PDP terjadi karena perbedaan kedudukan dan tanggungjawab. Meskipun penjatuhan sanksi pidana kepada badan publik tidak dapat dilakukan, namun lebih efektif jika sanksi pidana tersebut tetap dibebankan kepada oknum atau pejabat publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Selain itu perbedaan sanksi dapat berdampak pada kepastian hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan kepada korporasi dinilai sangat berat. Hal itu merupakan bentuk tindakan kesewenangan pemerintah atau pembentuk undang-undang sehingga dapat berdampak pada ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Ketidaksetaraan Sanksi, Pelindungan, Data Pribadi.

## ABSTRACT

*This research examines the inequality of sanctions between public bodies and corporations in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). Based on this, the purpose of this research is to find out the legal argumentation of unequal sanctions for public bodies and corporations in the PDP Law and the impact of unequal sanctions for public bodies and corporations in the PDP Law on legal uncertainty. This research is a type of normative legal research that uses primary and secondary legal materials. The research approaches used are conceptual, legislative, and comparative approaches. Data collection is done through literature study and interviews. Based on the results of the research, the results obtained are that the inequality of sanctions between public bodies and corporations in the PDP Law occurs due to differences in position and responsibility. Although the imposition of criminal sanctions to public bodies cannot be done, it is more effective if the criminal sanctions are still imposed on individuals or public officials who commit violations as known as vicarious liability or substitute responsibility. In addition, differences in sanctions can have an impact on legal certainty. The application of additional criminal sanctions to corporations is considered very heavy. It is a form of government or legislator arbitrariness so that it can have an impact on legal uncertainty.*

*Keywords: Sanction Inequality, Protection, Personal Data.*